

Evaluasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Pada Program Swasembada Pangan di Kabupaten Sidoarjo

Arief Cahyo Widodo¹, Sri Juni Woro Astuti², Dwi Wahyu Prasetyono³

email: masariefcahyo79@gmail.com

Pascasarjana
Universitas Wijaya Putra

Abstract

The development of the agricultural sector in order to increase rice production to ensure the availability of rice as the main food source is important and very strategic for the Indonesian people. The Strategy for Adding Planted Areas (LTT) for rice commodities carried out by the Government of Indonesia as well as improvements to irrigation infrastructure and agricultural machinery are strategic steps to optimize rice yields. The government is collaborating with Kodim 0816 Sidoarjo to optimize the achievement of the National Rice Self-Sufficiency target with the strategy of adding rice planting area. With the potential to reduce the amount of agricultural land in Sidoarjo Regency, it is hoped that it will not affect rice production and can even increase through the Rice Added Area (LTT) strategy. However, the existing strategy needs to be evaluated so that it can be more optimal in its implementation. The purpose of the study was to analyze the success of the strategy that had been carried out by the 0816/Sidoarjo Kodim and identify the factors that hindered the success of the Expanded Planting Area Program in the 0816 Sidoarjo Kodim area in increasing the assistance of the Special Effort Program (UPSUS) for Food Self-Sufficiency. This study uses a qualitative method, taking a case study of the 0816 Sidoarjo Kodim Special Efforts program in implementing the Rice Added Area (LTT) strategy in Sidoarjo Regency. The results of the study show that the area added-plant strategy has an impact on the achievement of the area-added-planting program in Sidoarjo Regency in the period 2014 – 2019 which is going well and shows increasing results every year. The inhibiting factor encountered at the beginning of the LTT strategy was the lack of coordination and collaboration between stakeholders, but after assistance from the 0816 Sidoarjo Kodim, which also acted as a liaison between related parties, the LTT strategy became more successful.

Keywords: Food Self-Sufficiency, Increase Planting Area

PENDAHULUAN

Program Swasembada Pangan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia ditargetkan akan tercapai dalam waktu 3 tahun sejak program tersebut diluncurkan pada Desember 2014. Kementerian Pertanian telah berhasil mengeksport beras premium ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Amerika Serikat maupun Jepang (Kurniawan pada kompas.com, 2019). Menurut Ketut Kariyasa, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, dalam tulisan Stella Maris pada liputan6.com bahwa total ekspor beras premium pada tahun 2013 sebesar 33,5

juta ton dan pada tahun 2018 berhasil mencapai 42,5 ton. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menargetkan Swasembada Beras dalam enam tahun atau pada akhir tahun 2019 cukup memenuhi kebutuhan stok pangan dalam negeri sekaligus menargetkan untuk melakukan ekspor beras ke luar negeri. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait dalam hal peningkatan produktifitas pertanian telah berupaya maksimal mewujudkan pencapaian swasembada beras pada akhir 2019. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan

Kementerian Desa dan PDT dalam pembangunan embung guna penyediaan air irigasi secara berkelanjutan di seluruh Indonesia (www.pertanian.go.id, 2017). Penempatan sektor pertanian guna mengembalikan kedaulatan pangan oleh Pemerintah merupakan suatu langkah penting yang perlu mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat. Hal ini merupakan suatu strategi untuk mewujudkan salah satu prioritas pemerintah yang tertuang dalam program Nawacita yaitu kedaulatan pangan. Realisasi pemerintah adalah terwujudnya target peningkatan swasembada pangan terhadap produk padi, kedelai, jagung dan gula sebagai komoditas pangan strategis. Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan pembangunan minimal 11.000 embung dari total 30.000 embung dengan jangkauan 1,5 juta ha hingga 2 juta ha (www.pertanian.go.id, 2019). Selain itu, program jangka Panjang kementerian pertanian dilakukan melalui program perbaikan irigasi, bantuan alat pertanian, pembangunan embung, pengembangan tata air mikro di lahan rawa dan pasang-surut dan bantuan benih tahan kekeringan untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan menghindari penurunan hasil produksi petani (www.pertanian.go.id, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu prioritas guna menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan beberapa infrastruktur yang secara langsung mendukung tercapainya peningkatan produksi padi dan komoditi pangan lainnya diantaranya dengan pembangunan beberapa irigasi baru maupun perbaikan irigasi yang telah ada merupakan pekerjaan yang relatif lama dan membutuhkan jumlah anggaran yang relatif besar. Selain itu, dalam konteks jenis bibit yang akan digunakan oleh para petani, kebutuhan jenis bibit yang sesuai dengan kontur tanah di wilayah yang beragam tentunya memerlukan dukungan riset pertanian yang tepat untuk memperoleh varietas padi yang sesuai dengan karakter lahan persawahan di wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah Sidoarjo pada khususnya. Riset untuk menemukan varietas

padi yang tepat ini membutuhkan dorongan dan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan jumlah anggaran yang relatif besar. Lahan kosong yang dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai lahan pertanian berubah fungsinya menjadi daerah pengembangan Industri maupun wilayah pemukiman penduduk atau wilayah perumahan penduduk. Kondisi ini menjadi probelmatika tersendiri yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak khususnya pemerintah daerah dalam mencari jalan keluar atau solusi persoalannya. Realisasi target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya swasembada beras tersebut perlu direncanakan dengan matang, mengingat bahwa realisasi terhadap target pencapaian pembangunan terganggu pada perencanaan program prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Sinkronisasi terhadap kesamaan pencapaian tujuan sangat diperlukan bagi para *Stakeholder* dan penentu kebijakan tingkat daerah masing-masing. Kementerian Pertanian dan TNI sangat serius dalam melaksanakan pentahapan pencapaian misi swasembada beras sebagai bagian dari swasembada pangan di Indonesia. Menteri Pertanian RI, yang didampingi oleh Asisten Teritorial Kasad pada kegiatan Rapat kordinasi jajaran Asisten Teritorial Kodam seluruh Indonesia (09/08/16), menekankan bahwa untuk mencapai program Swasembada beras terhadap komoditas padi sebagai bagian dari Swasembada pangan, perlu didukung dengan adanya peningkatan Luas Tambah Tanam. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan merubah percepatan pola pangan sebagai upaya untuk memenuhi target swasembada beras. Irjen Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan, pada saat kunjungan kerja sebagai penanggung jawab upaya khusus komoditi Padi Jagung Kedelai di Provinsi Lampung (23/10/2017) mengungkapkan Luas Tambah Tanam (LTT) adalah menambah lahan pertanian yang biasanya masyarakat menanam padi dua kali dalam satu tahun menjadi menanam padi tiga kali dalam satu tahun, serta sarana membuka lahan baru untuk dijadikan lahan fungsi yang

bisa ditanami oleh tanaman padi, Jagung atau Kedelai. Payung hukum kegiatan Luas Tambah Tanam tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan terpadu penyuluh, Mahasiswa dan Bintara Pembina Desa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi Padi, produksi Jagung dan produksi Kedelai.

Penerapan pola tanam saat ini mengalami perubahan. Jika terdahulu menggunakan pola musim, saat ini menggunakan pola metode tanam. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang harus diteliti terkait tentang strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan program swasembada pangan di masa yang akan datang, sehingga sama-sama menguntungkan petani dan pemerintah. Realisasi strategi antara Kementerian Pertanian dan TNI AD diantaranya melalui Program Upaya Khusus Swasembada Pangan.

Program Upaya Khusus Swasembada Pangan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama TNI sudah berjalan hampir 6 Tahun, dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata tentang keseriusan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian Indonesia khususnya komoditi padi untuk dijadikan beras sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada poin a alinea 1 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Upaya khusus yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian bersama dengan TNI AD yang direalisasikan di seluruh satuan

kwilayah di seluruh Indonesia diantaranya Satuan Kodim 0816/Sidoarjo tentunya dapat memberikan percepatan peningkatan progres panen padi di Sidoarjo dapat meningkat. Program yang tersinergikan antara Kodim 0816/Sidoarjo, Dinas Pertanian kabupaten Sidoarjo dan seluruh Kelompok Tani di wilayah Sidoarjo tentunya memberikan hasil padi yang semakin meningkat. Namun pada kenyataannya, bahwa produksi padi di Sidoarjo, dengan luas daerah pertanian yang sama, tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun pada tahun 2019 dibandingkan dengan hasil padi yang pernah terjadi pada tahun 2015. Kondisi tersebut sangat menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi kegiatan Luas Tambah Tanam sebagai upaya khusus yang dilakukan oleh Kodim 0816/Sidoarjo di kabupaten Sidoarjo.

Dari uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisa strategi yang diambil Kodim 0816/Sidoarjo dalam mendukung program swasembada pangan termasuk diantaranya menemukan model Implementasi Program Swasembada beras yang optimal dimasa yang akan datang, (2) menganalisa sejauhmana keberhasilan strategi peningkatan program Luas Tambah Tanam (LTT) khususnya pada Tanaman Padi dalam rangka mendukung program swasembada beras serta Implementasi Program Swasembada pangan di wilayah Kab. Sidoarjo, dan (3) menganalisa faktor-faktor penghambat keberhasilan program Luas Tambah Tanam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Sidoarjo bekerjasama dengan Kodim 0816/Sidoarjo

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat studi kasus pelaksanaan upaya khusus Kodim 0816/Sidoarjo terhadap kegiatan Luas Tambah Tanam dalam Program Swasembada Pangan di wilayah Sidoarjo. Dimensi penelitian yang digambarkan pada penulisan kali ini adalah tolak ukur keberhasilan 4 buah strategi yang telah diambil pada evaluasi Luas

Tambah Tanam di Kabupaten Sidoarjo sehingga program Swasembada Pangan dapat optimal terwujud di Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam hal ini fokus terhadap keberhasilan pelaksanaan Luas Tambah Tanam pada periode tahun 2014 sampai 2019. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data kualitatif berupa teknik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang pada model tersebut terdapat tiga tahapan analisis data, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait strategi meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) khususnya pada Tanaman Padi, peneliti mengacu pada identifikasi masalah pada perumusan masalah yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang sebenarnya memiliki luas sawah 22.545 Ha dengan tingkatan produksi rata-rata 7,5 s.d 8,5 Kwt/Ha. Dari data tersebut, Kab. Sidoarjo diharapkan dapat berkontribusi berupa surplus beras 10 Juta Ton setelah pemerintah menetapkan target peningkatan produksi beras 10 % pada tahun 2019. Kab. Sidoarjo juga memiliki peningkatan Indeks Pertanaman IP 2,24 s.d IP 2,25 sehingga optimalisasi penerapan tanam dan penerapan teknologi pengelolah tanaman secara terpadu dan pengamanan tanaman sangat diperlukan. Saat ini Kabupaten Sidoarjo telah mencapai produksi beras sebesar 130 Ton sehingga untuk pemenuhan beras konsumsi masih minus sekitar 40.000 sampai dengan 42.583 Ton beras pada tahun 2019, sehingga perlu adanya tambahan produksi beras sebesar 45.770 Ton. Dilihat dari data pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT), Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami pasang surut untuk mencapai target 100% yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya maksimal untuk

mendongkrak pencapaian Swasembada Pangan pada Tahun 2020.

Program peningkatan swasembada secara nasional pada program UPSUS ini merupakan pekerjaan yang dilaksanakan secara lintas sektoral antar Departemen dan Non Departemen serta Kementerian dengan pihak Swasta, untuk itu dalam upaya optimalisasi pencapaian keberhasilan dalam menambah Luas Tambah Tanam (LTT) memerlukan langkah-langkah yang cukup jitu.

Secara umum pelaksanaan UPSUS Swasembada Pangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cukup baik. Upaya Khusus Pemerintah ini menerapkan beberapa metode guna meningkatkan pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT), bahkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada tahun 2017 telah mengeluarkan buku yang berjudul Jurus mendorong Luas Tambah Tanam. Hal ini merupakan bukti pentingnya peran Luas Tambah Tanam (LTT) pada program Swasembada pangan, mengingat Upaya Khusus (UPSUS) percepatan peningkatan produksi dan swasembada padi, jagung dan kedelai (PAJALE) menjadi kegiatan utama strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Terdapat 4 (empat) strategi meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) khususnya pada Tanaman Padi dalam rangka mendukung program swasembada beras di wilayah Kab. Sidoarjo yang dilakukan oleh Kodim 0816 Sidoarjo. Strategi pertama, memperjelas regulasi penguatan hukum dan tugas pokok Kodim 0816 Sidoarjo yang lebih luas sebagai regulasi hubungan antar lembaga/instansi negara yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan UPSUS guna pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT). Strategi kedua, peningkatan SDM Prajurit Kodim 0816/Sidoarjo dibidang pertanian sebagai Upaya Khusus (UPSUS) untuk meningkatkan profesionalisme pembinaan kewilayahan dalam rangka mendukung Program TNI AD yang dituangkan dalam Program Kerja Anggaran Satuan Kodim 0816/Sidoarjo.

Strategi ketiga, Kodim 0816 Sidoarjo sebagai jembatan pusat berkoordinasi antar kelembagaan untuk mendapatkan data yang akurat serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi masa kini. Strategi keempat, mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengairan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan dengan Strategi Pertama, capaian LTT dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terbukti dalam laporan perkembangan Kodim 0816 Sidoarjo bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo setiap musimnya mampu mencapai target rata-rata 100%. Keberhasilan dalam meningkatkan produktifitas beras, bahwa berdasarkan data BPS pada tahun 2015 Kab. Sidoarjo memiliki luas panen sebesar 31.455 Ha dengan produktivitas 73,92 Kw/Ha merupakan sebagai angka tertinggi di Jawa Timur, sehingga diperoleh produksi Padi di Kab. Sidoarjo sebesar 232.519 Ton Gabah Kering Giling (110%) dari tahun 2014 yang hanya mencapai 202.439 Ton.

Terkait Strategi Kedua, keberhasilan peningkatan SDM Prajurit Kodim 0816/Sidoarjo dibidang pertanian sebagai UPSUS dalam meningkatkan profesionalisme yang dikolaborasikan dengan Program TNI AD, adalah bahwa TNI AD khususnya Kodim 0816 Sidoarjo telah banyak membuka lahan baru seperti halnya lahan TNI AD yang belum dimanfaatkan saat ini mampu sudah termanfaatkan sekitar 8 Ha yang bertempat di Ds. Sawotratap Kec. Gedangan. Selain itu Kodim 0816 Sidoarjo juga memiliki Program kerja Tahun Anggaran 2020 bidang Teritorial tentang Ketahanan Pangan yang diaplikasikan untuk membuka lahan demplot tanaman padi seluas 1 Ha di desa Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, dengan memanfaatkan beberapa brigade alsintan yang dimiliki oleh Kodim 0816 Sidoarjo, sehingga mampu memenuhi kebutuhan stok beras Sidoarjo 206 Ton Beras.

Kemudian, terkait Strategi Ketiga, keberhasilan strategi ini belum dapat terlihat secara signifikan dan tidak mudah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Kab.

Sidoarjo juga belum memiliki standar mekanisme tata cara pengaturan pola tanam karena penanganan mekanisme tata cara pengaturan pola tanam antara Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya air Kab. Sidoarjo dan Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo sangat berbeda, meskipun koordinasi secara intensif telah dilakukan namun dinamika dilapangan sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena data luasan tanam antara dua lembaga kedinasan tersebut belum sinkron. Kodim 0816 Sidoarjo telah melakukan upaya koordinasi sebagai pen jembatan antar kelembagaan untuk mendapatkan data yang akurat serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi masa kini. Sampai dengan saat ini pencapaian hasil yang optimal masih dalam proses oleh semua pihak.

Terkait dengan Strategi Keempat, keberhasilan Kodim 0816 Sidoarjo dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengairan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan cara "Hulu Gilir" yaitu secara bergantian, melaksanakan patroli-patroli di wilayah, melakukan pendampingan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan sistem pembagian air antar desa/kecamatan dan mekanisme pengawasan terhadap pintu-pintu air yang ada terutama pintu air pada saluran sekunder sampai pintu air (avooor) dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut menyebabkan ketersediaan air sangat mencukupi untuk kebutuhan pada masa tanam. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dapat menjaga ketersediaan air untuk pengairan sawah yang ada dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan.

Terdapat faktor penghambat keberhasilan untuk masing-masing strategi. Faktor penghambat Strategi Pertama yaitu belum adanya MoU (*memorandum of understanding*) lintas lembaga/instansi di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan mendukung kegiatan Swasembada Beras khususnya komoditi beras dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur kebijakan daerah secara teknis mengenai mekanisme

UPSUS Pertanian diantaranya tentang pengaturan irigasi antar wilayah, penanganan banjir lokal, penanganan pasca panen dan prioritas pengawasan Swsembada. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan penguatan hukum yang menitikberatkan pada teknis hubungan antar lembaga/instansi yang bekerja di bawah otorisasi Kodim 0816 Sidoarjo, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kepolisian Resort, dan BULOG sub drive Surabaya utara, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Selain itu konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian yang tidak terkendali, keterbatasan pencetakan lahan baru dan penurunan kualitas lahan berpotensi menyebabkan penurunan capaian Luas Tambah Tanam (LTT). Kemampuan pemerintah daerah untuk menambah luas areal persawahan menjadi sangat terbatas. Selain itu, penggunaan bibit varietas baru yang telah ditemukan dan diuji coba pada daerah kering sesuai dengan tipologi wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu bibit padi Raton, belum sepenuhnya di produksi secara massal oleh kementerian Pertanian. Dalam hal ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu mendorong produksi bibit padi Raton maupun bibit padi lainnya yang tahan terhadap daerah kering secara masal sehingga dengan lahan yang terbatas serta tidak mengalami peningkatan luas lahan namun ketersediaan padi dapat ditingkatkan dan target swasembada beras di wilayah Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo dapat terpenuhi.

Sementara itu, terkait faktor penghambat Strategi Kedua, faktor penghambat utama dalam program Luas Tambah Tanam adalah pola pikir petani yang masih berada pada zona nyaman menggunakan teknik konvensional di dalam mengolah lahan persawahan relatif sulit dirubah. Para petani memiliki hak mutlak dalam menentukan pilihannya, seperti yang terjadi di Kab. Sidoarjo banyak petani yang tidak mau menggunakan teknologi modern seperti halnya Alsintan Tranflenter (alat penanaman Padi), petani enggan menggunakan metode jajar legowo (JARWO), petani juga

enggan menanam benih padi unggulan dari BPTP, petani lebih cenderung menggunakan metode tradisional dan menggunakan bibit Cherang sebagai satu-satunya benih padi yang dibuat andalan untuk mencapai produksi padi/beras, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi petugas dilapangan yang melakukan pendampingan.

Kemudian, terkait faktor penghambat Strategi Ketiga, keterbatasan kemampuan personel dan jumlah personel yang dimiliki oleh Kodim 0816 Sidoarjo dalam melakukan kordinasi antar kelembagaan terkait sehingga Kodim 0816 Sidoarjo harus melakukan kordinasi secara ekstra khusus untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap irigasi air untuk memenuhi kebutuhan petani. Selain itu penggunaan alat komunikasi telepon genggam dengan sistem Android oleh para Babinsa Kodim 0816 Sidoarjo masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan monitoring Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian secara Online tidak optimal, belum lagi dengan kemampuan Kodim 0816/Sidoarjo dalam mendukung ketersediaan telepon genggam dengan sistem Android sebagai sarana pendukung monitoring Babinsa relatif sangat minim dan terbatas.

Adapun terkait faktor penghambat Strategi Keempat, kendala dilapangan mengenai sistem pengairan disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Lainnya. Di satu sisi, Kementerian Pertanian menargetkan Luas Tambah Tanam difokuskan pada pencapaian hasil penanaman Padi, di sisi lainnya Kemanterian PUPR bidang pengairan memprioritaskan sistem pola tata tanam secara bergantian, dimana tidak semua masyarakat melakukan penanaman padi secara serentak karena akan mempengaruhi pembagian air khususnya pada saat musim kemarau, melainkan penanaman dengan metode tanam padi, tanam jagung dan tanam kedelai.

PENUTUP

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian saat ini sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh penduduk Indonesia, salah satunya dengan strategi Luas Tambang Tanam (LTT). Perjalanan satu dasawarsa (2014-2019) UPSUS Luas Tambah Tanam (LTT) telah memberikan pelajaran penting dalam menetapkan kebijakan peningkatan produksi dengan mengotimalkan lahan yang tersedia saat ini. Namun tentu masih terdapat kendala sehingga diperlukan evaluasi pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT). Evaluasi diperlukan untuk mengoptimalkan strategi meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) khususnya pada Tanaman Padi dalam rangka mendukung program swasembada beras nasional dan khususnya di wilayah Kab. Sidoarjo yang dilakukan secara bersama-sama dengan Kodim 0816 Sidoarjo. Dengan memperjelas regulasi dan tugas pokok Kodim 0816 Sidoarjo yang lebih luas sebagai regulasi hubungan antar lembaga/instansi negara yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan UPSUS guna pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT) dengan memanfaatkan lahan tidur. Sebagai bagian dari program Swasembada Pangan, Kodim 0816 Sidoarjo juga harus mampu menjadi penghubung atau pusat koordinasi antar kelembagaan untuk mendapatkan data yang akurat serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi masa kini, serta mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengairan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Terobosan kebijakan telah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap peningkatan produksi. Pengolahan sumberdaya yang mengoptimalkan potensi yang ada dengan memanfaatkan lahan tidur, mencari sumber-sumber air sebagai kunci produksi, modernisasi pertanian dan pelaporan pendataan areal luas tambah tanam di Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian RI. Bahkan reformasi Manajemen dari sumber daya manusia pertanian telah memposisikan penyuluh pertanian,

mahasiswa, dosen dari perguruan tinggi, para Babinsa sebagai unsur TNI AD, Dinas Pertanian Daerah dan Bulog menjadi unsur penting yang menggerakkan para petani dalam menerapkan teknologi yang mendukung produksi.

Selain itu Kebijakan Pemerintah harus mampu mengubah pola pikir petani dalam mendukung program swasembada pangan dimasa yang akan datang dengan meningkatkan daya tarik Koperasi Unit Desa (KUD) kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan pengembangan internal dengan berkaca pada keberhasilan Swasembada Pangan di era tahun 80-an, dengan mengajak seluruh Komponen Bangsa untuk ikut mendukung program Swasembada Pangan dengan mengkolaborasikan peran pembinaan teritorial sebagai alat komunikasi dengan masyarakat/petani yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

Melihat kondisi nyata di lapangan sangat perlu penentuan strategi untuk meningkatkan Luas Tambah Tanam khususnya terhadap Kodim 0816/Sidoarjo sebagai bagian dari instansi pendukung pelaksanaan program Swasembada Pangan di Kabupaten Sidoarjo. Adanya strategi yang diambil tersebut berdampak terhadap hasil pencapaian program Luas Tambah Tanam di Kabupaten Sidoarjo pada kurun waktu 2014 – 2019 yang berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan ini tentunya merupakan realisasi kerjasama seluruh pihak terkait dan kepedulian masyarakat khususnya para petani untuk melakukan perubahan-perubahan secara fundamental terhadap kegiatan penanaman padi di wilayah masing-masing sesuai dengan strategi pertanian yang telah diarahkan oleh instansi terkait pendukung program Swasembada pangan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya seluruh pihak yang terhubung dengan baik dan adanya sinkronisasi yang baik antara seluruh instansi terkait dan para petani, maka faktor-faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir secara optimal sehingga kegiatan Luas Tambah Tanam dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor penghambat yang ditemui pada saat awal strategi Luas Tambah Tanam ini adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara Dinas Pangan dan Pertanian, KUD, Petani, BULOG dan setelah adanya pendampingan dari Kodim 0816 Sidoarjo yang juga berperan sebagai penghubung antara pihak yang terkait maka strategi LTT menjadi lebih berhasil.

Dari kesimpulan di atas penulis menyarankan bahwa pendampingan TNI dan Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo perlu dijadikan percontohan dan dilanjutkan untuk seluruh wilayah Indonesia agar betul-betul sukses dalam mencapai Swasembada Beras dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Selain itu disarankan agar sinkronisasi antar program kerja TNI AD khususnya program kerja di satuan komando kewilayahan dapat diselaraskan dengan program dari kementerian Pertanian sehingga terdapat suatu kesamaan visi dan misi dalam mendukung program Swasembada beras Nasional, dalam hal ini diharapkan Kementerian Pertanian dapat mendukung ketersediaan program monitoring pendukung Swasembada pangan berbasis teknologi secara online yang difasilitasi oleh APBN demi terwujudnya sistem kerja yang cepat dan tepat. Selanjutnya, sangat perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap kebijakan Kementerian Pertanian tentang penerapan pola tanaman Padi sepanjang tahun secara berturut-turut dan sinkronisasi pola pengaturan rencana tata tanam dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur Sawah. Buku petunjuk Induk tentang pembinaan teritorial (Binter) yang disahkan dengan peraturan Kasad Tahun 2011 PI: TER-01.b.
- Dunn, N. William (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2016). Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola.
- Howlett, Michael dan Ramesh M (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. New York: Oxford University Press.
- Kementerian Pertanian. (2019). Kementerian Pertanian - Atasi Kemarau Kementan Buat Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang di <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2195> diakses tanggal 29 Agustus 2019.
- Kementerian Pertanian. (2017). TNI-AD Konsisten Dukung Swasembada Pangan. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1727> diakses pada 10 Maret 2019
- Kementerian Pertanian. (2017). Percepat LTT Senjata Ampuh Menembak Pro Impor Beras. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2323> diakses pada 10 Maret 2019
- Kurniawan, Alek (2019). <https://money.kompas.com/read/2019/07/09/183628726/ekspor-beras-premium-saat-kemarau-bukti-kemandirian-pangan-indonesia> diakses pada 7 Agustus 2019
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (2005). Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Riyadi (2003). Penilaian Gizi Secara Antropometri. Bogor: Departemen Gizi dan Masyarakat. Salemba Medika.
- Silalahi, Ulbert (1992). Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: CV Sinar Baru.
- Stewart (1998). Empowering people: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Siagian, Sondang. P (2006). Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surat Telegram Kasad Nomor ST/3439/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang perintah untuk segera menyusun Program Swasembada Pangan di daerahnya masing - masing yang meliputi padi, jagung dan kedele (pajale).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan.
- Undang-undang Negara RI Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, Heri (2011). Ketahanan Pangan pada Jurnal Sosial Humanoria, Vol 4 No. 2, November 2011.
- Taufiqurokhman (2014). Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tjiptono, Fandy (2006). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wayne Parsons (2011). Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (terjemahan) Edisi ke empat. Jakarta: Kencana Press.
- Weingartner, L (2000). The Concept of Food and Nutrition Security in Klaus Klennert (ed). Achieving Food and Nutrition Security: Actions to Meet the Global Challenge. Bonn, Germany.